

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan yang menonjol dalam proses pembangunan ekonomi, termasuk di Provinsi Bali. Meskipun wilayah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama dari sektor pariwisata, distribusi pendapatan antar kabupaten dan kota belum merata. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan ketimpangan pendapatan di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali selama periode 2014 hingga 2023. Adapun berikut ini kesimpulan dari hasil analisis tersebut:

1. Upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten dan kota Provinsi Bali. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan kelompok pekerja yang memiliki upah dibawah UMK sehingga pada gilirannya dapat memperbaiki distribusi pendapatan di Provinsi Bali.
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten dan kota Provinsi Bali. Hal tersebut disebabkan tingginya jumlah masyarakat yang berkerja di sektor informal dan belum meratanya penyediaan lapangan kerja yang disediakan pemerintah masing-masing wilayah kabupaten/kota.
3. Penanaman modal asing (PMA) menunjukkan pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten dan kota Provinsi Bali. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi investasi asing pada sektor

dan wilayah tertentu, sehingga belum berdampak luas terhadap pemerataan pendapatan.

4. Jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah kabupaten dan kota Provinsi Bali. Semakin besar jumlah penduduk miskin, semakin tinggi tingkat ketimpangan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan dasar yang menghambat peningkatan kesejahteraan kelompok bawah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya diperlukan upaya konkret dari pemerintah daerah, pelaku ekonomi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merespons hasil temuan ini dengan kebijakan yang tepat sasaran. Beberapa saran berikut diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya menekan ketimpangan pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah dan pelaku ekonomi
 - a. Pemerintah daerah perlu mendorong mekanisme penetapan upah minimum yang lebih inklusif melalui kesepakatan antara pelaku usaha, perwakilan pekerja, dan pemerintah. Penyesuaian upah minimum sebaiknya tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mempertimbangkan kemampuan membayar pengusaha, kebutuhan hidup layak bagi pekerja, serta tingkat inflasi dan produktivitas di daerah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan upah yang berkeadilan, mendorong perlindungan terhadap pekerja berupah rendah, serta turut berkontribusi dalam menekan tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

b. Pemerintah daerah perlu menjalankan program pengentasan kemiskinan yang terarah dan berkelanjutan guna menekan ketimpangan pendapatan. Beberapa program yang dapat diterapkan antara lain peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis desa, bantuan modal usaha ultra mikro, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin. Selain itu, program Padat Karya Tunai Desa dapat diperluas untuk menyerap tenaga kerja tidak terampil, sedangkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) perlu dipastikan tepat sasaran. Dengan pelaksanaan program-program tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan pendapatan kelompok miskin meningkat dan kesenjangan pendapatan dapat ditekan.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, seperti tingkat pendidikan, akses layanan kesehatan, atau kualitas infrastruktur. Selain itu, analisis bisa dikembangkan dengan menggunakan pendekatan lain atau menambah jumlah tahun pengamatan agar hasilnya lebih akurat dan mendalam.